

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara konstitusional, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964. Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan sejak masih bernama Batavia pada masa Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Usulan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lainnya telah didiskusikan sejak kepresidenan Soekarno hingga Joko Widodo.

Pemindahan Ibu Kota Negara adalah suatu keputusan strategis yang tidak hanya mengubah geografis pemerintahan, tetapi juga merintis perubahan sosial budaya yang signifikan dalam jangka panjang. Transisi ini memunculkan revolusi dalam pola pikir masyarakat, nilai-nilai budaya, dan dinamika sosial. Pergeseran pusat kekuasaan dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara membawa bersamanya gelombang penduduk baru, ideologi baru, dan praktik budaya yang berbeda.

Membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya (Kominfo, 2020). Siagian (1994 dalam Badruddin, 2021) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Kementerian PPN/Bappenas telah memproyeksikan jumlah penduduk IKN akan bertambah dari 100 ribu jiwa di tahun 2020 menjadi 700 ribu jiwa di 2035,

kemudian berkembang menjadi 1,5 - 1,6 juta jiwa di 2045. Rencana pemindahan ibukota ini juga direncanakan dengan perpindahan pegawai pemerintahan (Aparatur Sipil Negara) inti yang juga nantinya dilaksanakan secara bertahap setelah infrastruktur yang akan dibangun di IKN telah rampung dan siap digunakan.

Perpindahan dari Ibu Kota Nusantara (IKN) tentunya akan meningkatkan laju migrasi dan akan mempertemukan budaya pendatang dengan budaya masyarakat setempat. Menimbang perbedaan budaya dan beragamnya nilai masyarakat Indonesia, hal ini tidak luput akan kerentanan terjadinya gesekan diantara budaya tersebut. Tidak hanya dari sisi perbedaan budaya saja, permasalahan lain yang muncul sangat tinggi potensinya untuk berubah menjadi suatu konflik di masyarakat terutama konflik sosial.

Wacana pemindahan ibukota NKRI ke wilayah baru memerlukan banyak persiapan termasuk didalamnya keterkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perubahan kebijakan pembangunan publik yang kemudian berdampak pada perubahan sosial dan juga pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat terkait pemindahan ibukota negara. (Hartati, 2019 dalam Hana, dkk, 2022). Kebudayaan penduduk setempat yang sudah mempengaruhi hidup secara turun temurun perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebagai bagian dari pembangunan IKN Nusantara. Penduduk setempat dan penduduk pendatang akan menyatu dan melakukan perubahan secara sosial dan budaya secara bersama-sama. Perubahan besar dan menyeluruh wujud dan karakteristik penduduk suatu keadaan ke keadaan lain untuk menjadi lebih baik atau lebih maju dikenal dengan istilah transformasi sosial budaya (Kristanto, 2018 dalam Hari, 2022).

Menurut Gillin dan Gillin, suatu perubahan sosial itu merupakan variasi dari cara dan gaya hidup yang sudah diterima, baik itu dikarenakan sebuah ideologi, kebudayaan material, berubahnya kondisi geografis, sampai dengan komposisi penduduk, dikarenakan dengan adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam sebuah pengertian tersebut, Gillin dan Gillin lebih tertuju terhadap sebuah dinamika masyarakat dan reaksi mereka pada suatu lingkungan sosialnya, baik itu yang menyangkut cara dan gaya mereka dalam kehidupan, kondisi alam sekitar, budaya mereka, dinamika kependudukan sampai dengan filsafat hidup yang dianut dan yang telah ditemukannya sebuah hal-hal baru dalam kehidupan mereka (Marius, Jelamu Ardu, 2006 dalam Fauzi, 2020).

Pemindahan Ibu Kota Negara membawa pengaruh sosial budaya, yaitu perubahan sosial budaya yang terjadi sangat cepat (Revolusi), potensi konflik pendatang dan penduduk setempat, perpindahan penduduk ke daerah sekitar yang menuntut penanganan sosial tertentu, serta harus membentuk budaya baru dengan konsep dan tata ruang dan manajemen perkotaan modern. Sehingga, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur perlu dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah yang tidak kita inginkan (Prasojo, 2020 dalam Hari, 2022).

Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke pulau Kalimantan telah menimbulkan perdebatan dan meningkatkan minat publik terhadap isu tersebut. Seiring dengan perbincangan yang semakin intens mengenai pemindahan ibu kota, banyak masyarakat yang memiliki persepsi yang berbeda antara menyetujui dan menentang pemindahan ibu kota Indonesia. Menurut Gibson (dalam Kuntuyassari,

2001) mengatakan persepsi adalah proses pemberian arti (kognitif) terhadap lingkungan oleh individu untuk menafsirkan atau memahami dunia sekitarnya.

Berpijak pada data yang didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Populi Center di bulan November 2019 menunjukkan bahwa total sebesar 52,5 persen masyarakat setuju dengan rencana pemindahan pemerintah untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Sedangkan masyarakat yang menilai tidak setuju terkait rencana pemindahan tersebut total sebesar 9,7 persen. Dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat setuju jika ibu kota berpindah tangan dari Jakarta ke Kalimantan Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara (Populi Center, 2019).

Polling yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAIR. Polling ini dilakukan di Surabaya dengan melakukan wawancara kepada 350 responden. Mayoritas responden beranggapan bahwa persiapan pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh pemerintah dinilai belum maksimal, hal ini terjadi karena pemerintah dirasa kurang terbuka terhadap opini masyarakat mengenai isu tersebut, sehingga membawa kesan bahwa pemerintah belum siap terhadap pemindahan ibu kota. Selain itu juga dibarengi dengan banyaknya *problem* di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya serta masalah krusial lainnya yang belum teratasi secara maksimal. Maka, hal-hal seperti itulah dapat menggiring opini masyarakat bahwasannnya pemerintah belum siap serta dirasa gegabah dalam pengambilan kebijakan mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, hal itu dapat dilihat dari banyaknya permasalahan dan pekerjaan yang belum terselesaikan secara tuntas di Indonesia (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik UNAIR, 2019).

Pembangunan ibu kota nusantara yang sedang berlangsung menandai peristiwa monumental yang tak hanya memberikan dampak langsung pada pemerintahan dan infrastruktur, tetapi juga mengakibatkan perubahan menyeluruh di lingkungan masyarakat sekitarnya. Salah satu kota yang terdampak secara signifikan adalah Kota Samarinda, yang memegang peranan krusial sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan di Kalimantan Timur. Dalam konteks ini, pembangunan ibu kota negara baru tidak hanya menciptakan gelombang perubahan, tetapi juga membawa implikasi yang substansial bagi berbagai segmen masyarakat, termasuk Siswa dan Guru di SMKN 5 Samarinda.

Sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses pendidikan dan kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dan guru di SMKN 5 Samarinda memainkan peran dalam menghadapi dan merespons perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan ibu kota nusantara. Keberhasilan implementasi pembangunan ini dan dampaknya pada masyarakat lokal menjadi semakin penting ketika kita mempertimbangkan generasi penerus bangsa, terutama siswa-siswi yang sedang menempuh pendidikan dan akan segera memasuki dunia nyata setelah lulus sekolah.

Penelitian mengenai "Persepsi Siswa dan Guru SMKN 5 Samarinda Tentang Pembangunan Ibu Kota Nusantara" bukan hanya relevan tetapi juga bermakna dalam memahami kedalaman pemahaman, penerimaan, dan respons terhadap perubahan yang terjadi di tengah-tengah proses pembangunan ibu kota negara baru. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman

yang lebih mendalam tentang bagaimana siswa dan guru memandang pembangunan ibu kota negara, baik dari segi pengetahuan, emosi, maupun perilaku, yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan dan program pendidikan yang lebih relevan dan efektif. Analisis terhadap pandangan mereka dapat memberikan wawasan berharga terkait bagaimana perubahan ini memengaruhi aspek-aspek kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks pendidikan, serta memberikan gambaran lebih lanjut tentang bagaimana perspektif mereka dapat membentuk dan memengaruhi dinamika sosial di tingkat lokal.

Siswa dan guru di SMKN 5 Samarinda menjadi subjek penelitian yang sangat relevan karena mereka memegang peran sentral dalam membentuk dan membimbing generasi muda yang akan menghadapi dampak langsung dari perubahan sosial budaya yang terjadi akibat pembangunan ibu kota negara baru. Pertama-tama, sebagai representasi generasi muda, peran siswa menjadi krusial dalam menghadapi tantangan masa depan. Pemahaman mereka terhadap perubahan ini akan membentuk pola pikir, nilai-nilai, dan sikap mereka terhadap dinamika sosial yang tengah berkembang. Sebagai penerima langsung dari proses pendidikan, persepsi siswa terhadap perubahan ini dapat memberikan pandangan tentang sejauh mana pengetahuan mereka berkembang dan sejauh mana mereka mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Sementara itu, guru sebagai agen pembimbing memiliki tanggung jawab utama dalam membentuk pemahaman siswa. Guru juga memainkan peran penting dalam memberikan panduan dan dukungan kepada siswa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan dan perubahan akibat pemindahan ibu kota negara ini.

Kota Samarinda menjadi jantung dengan perannya sebagai pusat sejarah Kalimantan Timur dalam sektor energi terbarukan. Dari pusat Kota Samarinda ke lokasi Ibu Kota Nusantara berjarak lebih kurang 37 kilometer sampai 40 kilometer dan memakan waktu tempuh berkisar dua sampai tiga jam perjalanan melalui jalan tol Balikpapan-Samarinda (CNBC Indonesia, 2022). SMKN 5 Samarinda yang berbatasan dengan ibu kota nusantara menjadi lokasi penelitian yang strategis karena keberadaannya secara geografis dapat membuat mereka lebih rentan terhadap dampak perubahan sosial budaya yang terjadi. Oleh karena itu, memahami persepsi siswa dan guru di sekolah ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana perubahan tersebut dirasakan dan diresapi di tingkat lokal.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “**Bagaimana Persepsi Siswa dan Guru SMKN 5 Samarinda Tentang Pembangunan Ibu Kota Nusantara**”. Selanjutnya, untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan tersebut, penulis menjabarkan serta merincikan permasalahan tersebut kedalam sub-sub pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana pengetahuan (kognitif) Siswa dan Guru tentang pembangunan ibu kota nusantara?
3. Bagaimana perasaan (afektif) Siswa dan Guru terhadap pembangunan ibu kota nusantara?

4. Bagaimana perilaku (konatif) Siswa dan Guru terhadap pembangunan ibu kota nusantara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran secara empiris tentang:

1. Karakteristik informan.
2. Mengetahui pengetahuan (kognitif) Siswa dan Guru tentang pembangunan ibu kota nusantara.
3. Mengetahui perasaan (afektif) Siswa dan Guru terhadap pembangunan ibu kota nusantara.
4. Mengetahui perilaku (konatif) Siswa dan Guru terhadap pembangunan ibu kota nusantara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan ilmu Pekerjaan Sosial dalam memberikan pemahaman tentang perubahan infrastruktur dan pemerintahan di suatu wilayah dapat mempengaruhi pengetahuan, perasaan, dan perilaku masyarakat terhadap perubahan sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan memahami persepsi dan respon siswa serta Guru SMKN 5 Samarinda tentang pembangunan ibu kota nusantara, pihak sekolah dapat

menyusun program pembinaan dan dukungan yang sesuai untuk membantu mereka menghadapi perubahan tersebut.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat tentang latar belakang penelitian, data awal penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL

Kajian konseptual yang memuat tentang penelitian terdahulu yang terdiri dari penelitian tentang persepsi dan penelitian tentang pembangunan ibu kota negara

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukan informan, pemeriksaan keabsahan data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan jadwal serta langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini memuat gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V USULAN PROGRAM

Pada bagian ini memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksanaan program, metode, dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini memuat tentang kesimpulan dan saran.